

Katalog : 7203005.51

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2015-2019





STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2015 – 2019

ISSN : 2477-7773
Nomor Publikasi : 51540.2007
Katalog : 7203005.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 56

Naskah : Bidang Statistik Distribusi
Penyunting : Bidang Statistik Distribusi
Disain Kover : Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Bali
Dicetak oleh : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



Tim Penyusun

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015-2019

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Adi Nugroho, M.M.

Penanggung Jawab Teknis:

I Gede Nyoman Subadri, SE.

Koordinator:

I Made Putra Astawa, SE.

Anggota:

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.

Desain/Layout:

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.

<https://doi.org/10.24127/bppsp.id>



<https://bali.bps.go.id>





KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), pilar kelima berupa pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali kembali menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2015 – 2019. Ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali selama tahun 2015 – 2019 juga disertakan di dalamnya. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali,

Ir. Adi Nugroho, M.M.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan.....	4
II. METODOLOGI	
2.1 Ruang Lingkup.....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	5
III. ULASAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI BALI 2015 – 2019	
3.1 Gambaran Umum.....	20
3.2 Pendapatan Daerah	24
3.3 Belanja Daerah	29
LAMPIRAN TABEL	35





<https://bali.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota	20
Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2019 (triliun rupiah)	21
Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)	22
Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)	23
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)	25
Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)	26
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)	27
Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)	28





Gambar 9.	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen).....	29
Gambar 10.	Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen).....	30
Gambar 11.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen).....	31
Gambar 12.	Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen).....	33

<https://bali.bps.go.id>





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	37
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	38
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	39
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	40
Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	41
Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	42
Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	43
Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	44
Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	45
Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	46
Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	47





Tabel 12.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	48
Tabel 13.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	49
Tabel 14.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	50
Tabel 15.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	51
Tabel 16.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 – 2019 (000 Rp) ...	52
Tabel 17.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	53
Tabel 18.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2015 – 2019 (000 Rp)	54
Tabel 19.	Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2015 – 2019 (000 Rp) ...	55
Tabel 20.	Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2015 – 2019 (000 Rp).....	56





I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini didasari asumsi bahwa Pemerintah Daerah merupakan institusi yang paling mengerti/memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal Pemerintah Daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunannya. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar





untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat menunjukkan potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu memperlihatkan ke mana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya





yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio – rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio – rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun dengan harapan memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Disajikan pula gambaran mengenai anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2015 – 2019.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015 – 2019, yaitu untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.





1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015 – 2019 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015–2019.
4. Lampiran Tabel-tabel





II. METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Data yang disajikan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015 – 2019 meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019. Kabupaten/Kota yang dicakup meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Sementara itu, data yang dicakup merupakan data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengkompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kantor Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Bali yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah masing-masing melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

2.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan





Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sebagai berikut :

❖ **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

❖ **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

❖ **Pajak Daerah**

Pajak daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.





Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

❖ **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

❖ **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

❖ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain.





❖ Dana Perimbangan

Dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

❖ Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

➤ Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

➤ Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

❖ Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan



fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

❖ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

❖ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.





❖ **Belanja Daerah**

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

❖ **Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

❖ **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**

Belanja pegawai (tak langsung) didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.





❖ **Belanja Bunga**

Belanja bunga didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

❖ **Belanja Hibah**

Belanja hibah didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

❖ **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.





❖ **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

❖ **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tak terduga didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.





❖ **Belanja Langsung**

Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

❖ **Belanja Pegawai (Langsung)**

Belanja pegawai (langsung) didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

❖ **Belanja Modal**

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.





❖ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

❖ **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

❖ **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

❖ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.





❖ **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

❖ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

❖ **Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

❖ **Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir**

Penerimaan kembali investasi dana bergulir didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

❖ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.





❖ **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

❖ **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

❖ **Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran pokok utang didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga.





❖ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa rasio yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan Pemerintah Daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi rasio-rasio yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

❖ Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.





❖ **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)

❖ **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir(2004:48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

❖ **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Data belanja pegawai di sini adalah penjumlahan dari belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.





❖ **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh,dkk: 2011).

<https://bali.bps.go.id>



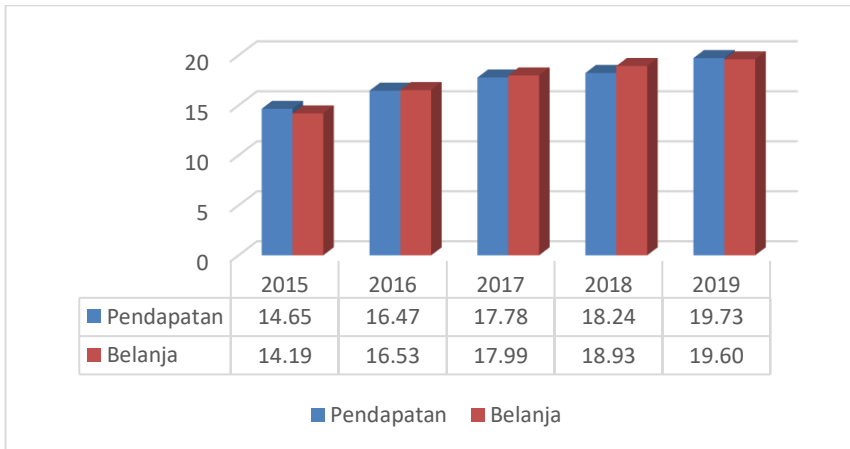


III. Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015 – 2019

3.1 Gambaran Umum

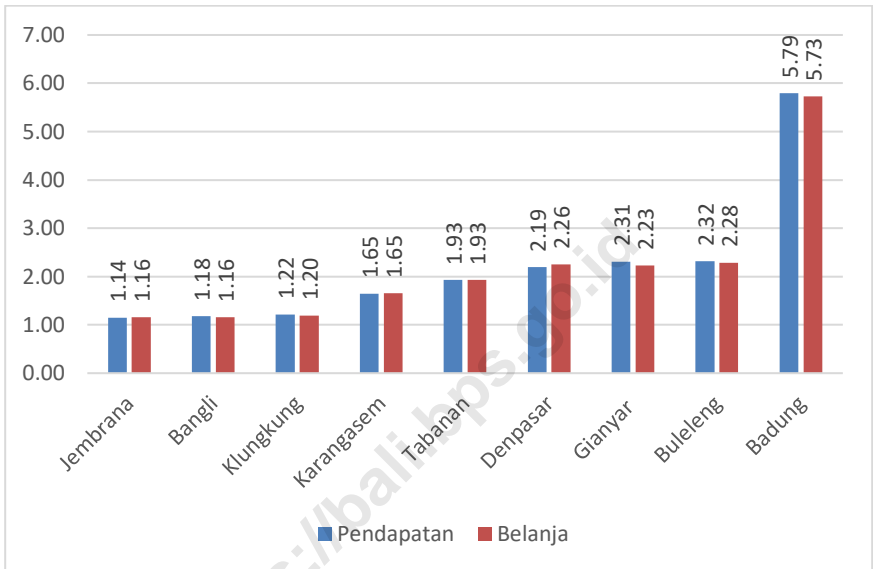
Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2015 – 2019 dari seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat adanya trend kenaikan pendapatan maupun belanja daerah (gambar 1). Jumlah pendapatan Pemerintah Daerah 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 14,65 triliun rupiah di tahun 2015 kemudian menjadi 19,73 triliun rupiah pada tahun 2019, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 34,68 persen atau tumbuh rata – rata 8,67 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan. Dalam rentang waktu 2015 – 2019, belanja daerah tumbuh dari 14,19 triliun pada tahun 2015 menjadi 19,60 triliun di tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 38,13 persen atau naik rata - rata 9,53 persen per tahun.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2015 – 2019 (Triliun Rupiah)





Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2019 (triliun rupiah)



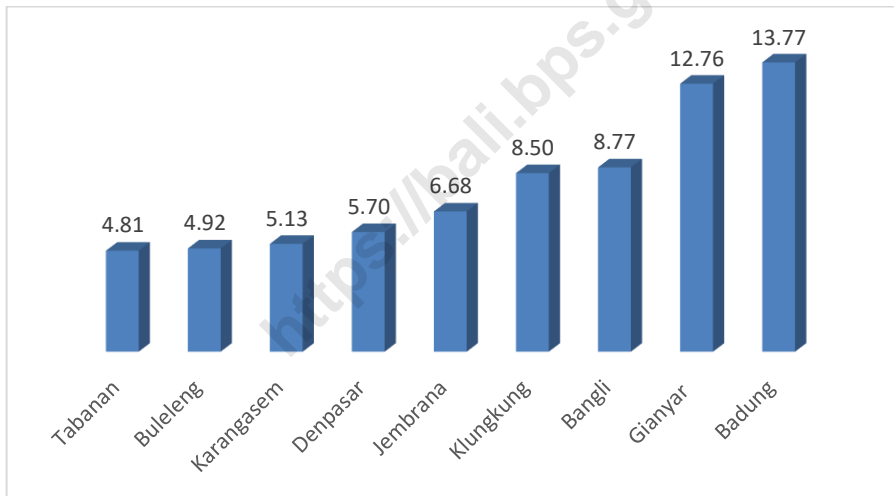
Berdasarkan realisasi pendapatan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2019 (gambar 2), menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki pendapatan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan penerimaan APBD pada tahun 2019 mencapai 5,79 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 5,73 triliun rupiah. Selanjutnya disusul Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar yang mencapai penerimaan APBD masing-masing sebesar 2,32 triliun rupiah dan 2,31 triliun rupiah serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 2,28 triliun rupiah dan 2,23 triliun rupiah. Kabupaten yang memiliki capaian realisasi APBD tahun 2019 paling rendah tercatat di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli. Realisasi capaian penerimaan APBD Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 mencapai 1,14 triliun





rupiah dan belanja daerah senilai 1,16 triliun rupiah. Sedangkan realisasi penerimaan APBD Kabupaten Bangli pada tahun yang sama mencapai 1,18 triliun rupiah dan belanja sebesar 1,16 triliun rupiah. Pada tahun 2019, dari 9 kabupaten/kota di Bali, tercatat 2 (dua) pemerintah kabupaten/kota yang mencatatkan realisasi pengeluaran APBD lebih besar dari realisasi pendapatannya. Kekurangan ini selanjutnya dipenuhi melalui komponen pembiayaan daerah.

Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)

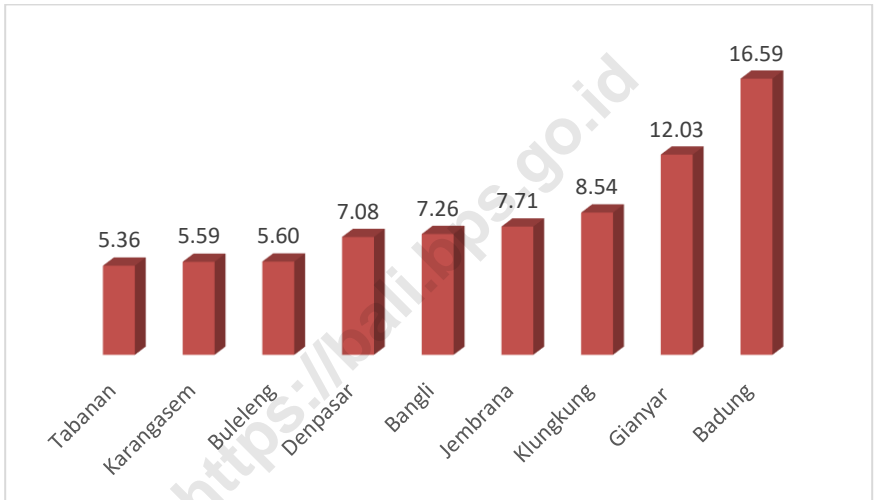


Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten/kota se- Provinsi Bali pada periode 2015 – 2019 berada di atas 4,50 persen (Gambar 3). Pendapatan daerah Kabupaten Badung tercatat mencapai rata – rata pertumbuhan tertinggi di Provinsi Bali dalam periode tahun 2015 – 2019, yaitu 13,77 persen per tahun. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masing-masing sebesar 12,76



persen dan 8,77 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah terendah dalam periode 2015 – 2019 tercatat di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 4,81 persen per tahun.

Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun dalam rentang waktu 2015 – 2019 seperti tertuang dalam gambar 4, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun yang paling tinggi tercatat di Kabupaten Badung dengan rata-rata belanja daerah per tahun tumbuh sebesar 16,59 persen, disusul oleh Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah masing-masing sebesar 12,03 persen dan 8,54 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun paling rendah tercatat di Kabupaten Tabanan yang mencapai 5,36 persen.





Berdasarkan gambar 3 dan gambar 4, terlihat bahwa dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, tercatat 7 kabupaten/kota pada periode 2015 – 2019 yang memiliki rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah per tahun melebihi rata-rata pertumbuhan pendapatannya. Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per tahunnya lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan pengeluaran per tahunnya.

3.2 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

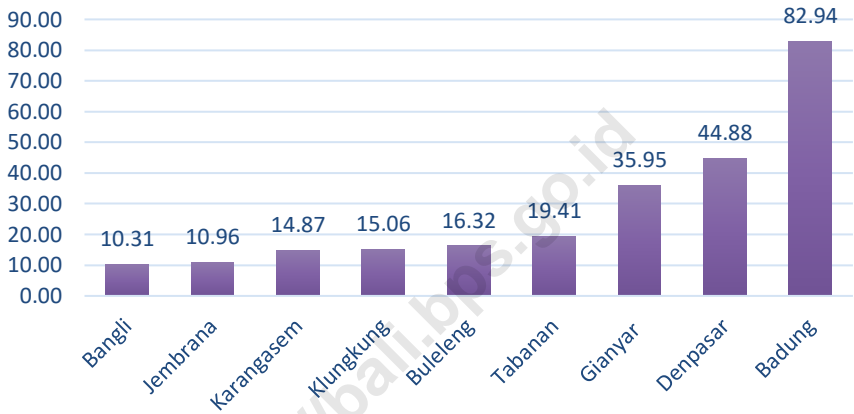
Dalam pengukuran desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menyelenggarakan desentralisasi.





Rata-rata derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



Bila dilihat rata-rata derajat desentralisasi fiskal dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali selama tahun 2015 – 2019 tercatat Kabupaten Badung memiliki kemampuan tertinggi, mencapai 82,94 persen. Sementara itu wilayah yang tercatat memiliki rata-rata derajat desentralisasi paling rendah tercatat di Kabupaten Bangli dengan nilai 10,31 persen. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi tentang pengelompokkan nilai derajat desentralisasi, Kabupaten Badung termasuk memiliki kemampuan desentralisasi yang sangat baik. Sementara itu Kabupaten Bangli masih tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal paling kecil dan termasuk dalam kategori kurang. Kondisi Kabupaten lain yang mendampingi Kabupaten Bangli dengan derajat desentralisasi fiskal dalam kategori kurang, yaitu Kabupaten Jembrana,

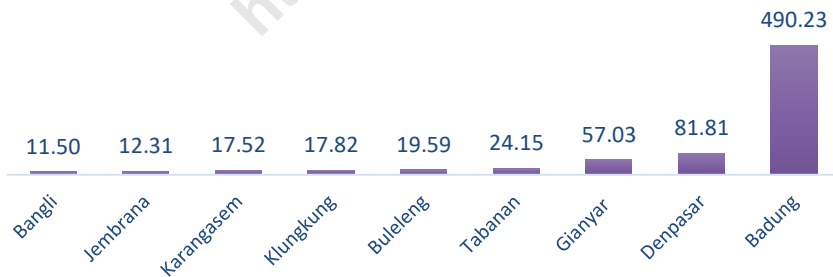




Klungkung, Karangasem, Buleleng dan Tabanan. Di sisi lain, Kabupaten Gianyar sudah termasuk memiliki kemampuan desentralisasi yang cukup, selanjutnya Kota Denpasar tercatat dengan kemampuan desentralisasinya yang berada pada kategori baik.

Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian/rasio antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010:77). Dalam kurun waktu 2015 – 2019, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 6 berikut:

Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



Seperti yang disajikan pada Gambar 6, Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi, yaitu sebesar 490,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kemandirian fiskal

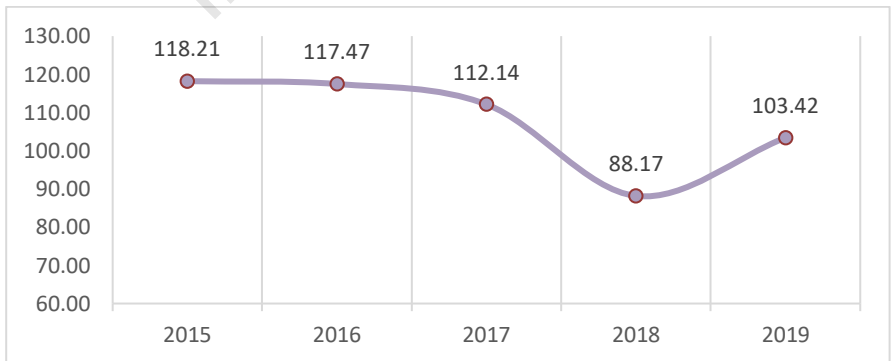




yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan mencapai hampir lima kali lipat pendapatan diluar PAD. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Bangli tercatat memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang paling rendah, hanya 11,50 persen. Hal ini kiranya menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bangli masih belum mampu mandiri secara fiskal dan masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya untuk mendanai kegiatannya.

Mengingat peran PAD merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah diharapkan sedapat mungkin mengelola PAD tersebut secara efektif dan efisien. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.

Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



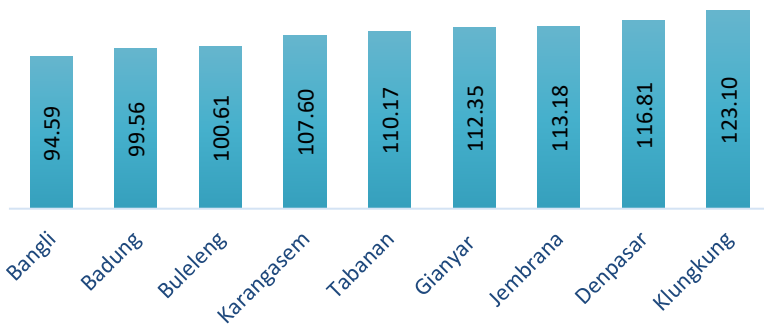
Secara umum, rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2015 – 2019 masih menunjukkan nilai di atas 100 yang berarti bahwa realisasi PAD selalu lebih tinggi





dibandingkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD, kecuali tahun 2018. Perkembangan rasio ini selama periode 2015 – 2019 menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, dan mencapai titik terendah di tahun 2018 dengan capaian 88,17 persen. Pada tahun 2019, rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah tercatat kembali mengalami kenaikan dengan capaian 103,42 persen. Bila dilihat rata – rata rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2015 – 2019, terlihat hampir seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali memiliki nilai rasio di atas 100 (gambar 8), kecuali Kabupaten Bangli dan Badung. Kabupaten Klungkung tercatat memiliki nilai rata-rata rasio tertinggi selama kurun waktu 2015 – 2019 yaitu sebesar 123,10 persen. Sementara kabupaten/kota dengan rasio terendah tercatat di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 94,59 persen. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lagi potensi riil daerahnya yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai PAD sehingga dapat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)



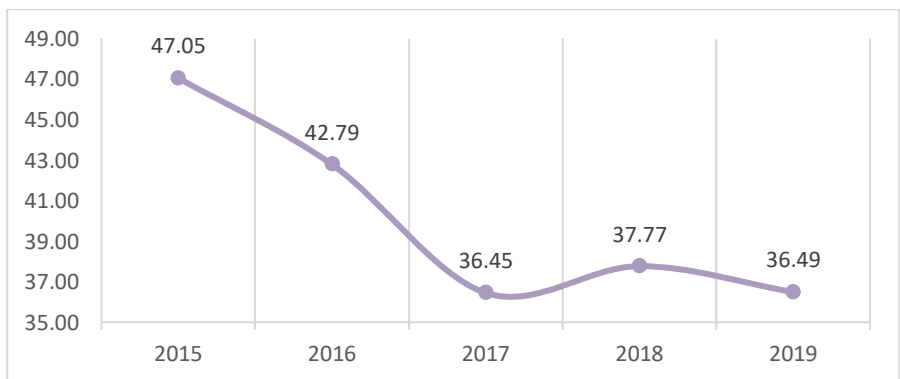


3.3 Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah, di samping memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja suatu daerah dapat memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2015 – 2019 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja daerah masih tercatat cukup didominasi oleh belanja pegawai. Pada tahun 2015, presentase belanja pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai 47,05 persen. Namun seiring dengan waktu, rasio belanja pegawai tercatat mengalami penurunan dengan capaian di tahun 2019 mencapai 36,49 persen (Gambar 9).

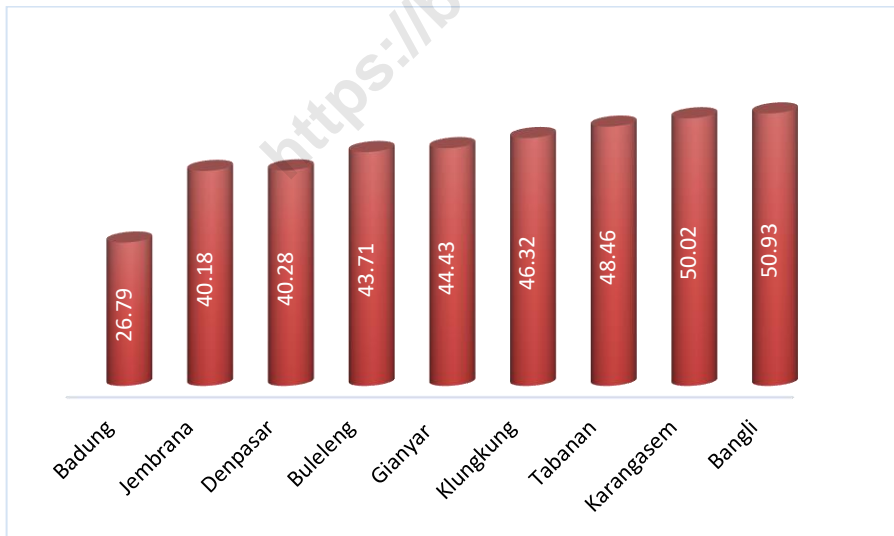
Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)





Dalam rentang waktu 2015 – 2019, dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali, kini hanya menyisakan Kabupaten Bangli dan Karangasem yang tercatat memiliki rata-rata belanja pegawai di atas 50 persen. Secara rata – rata, rasio belanja pegawai terhadap total belanja yang tercatat paling tinggi dalam periode 2015 – 2019, yaitu di Kabupaten Bangli sebesar 50,93 persen, disusul oleh Kabupaten Karangasem sebesar 50,02 persen. Sementara itu, kabupaten lainnya sudah cukup mampu untuk menekan belanja pegawai di bawah 50 persen. Bahkan, Kabupaten Badung mampu untuk menekan belanja pegawai hingga mencapai rata-rata 26,79 persen per tahun dalam rentang waktu 2015 – 2019.

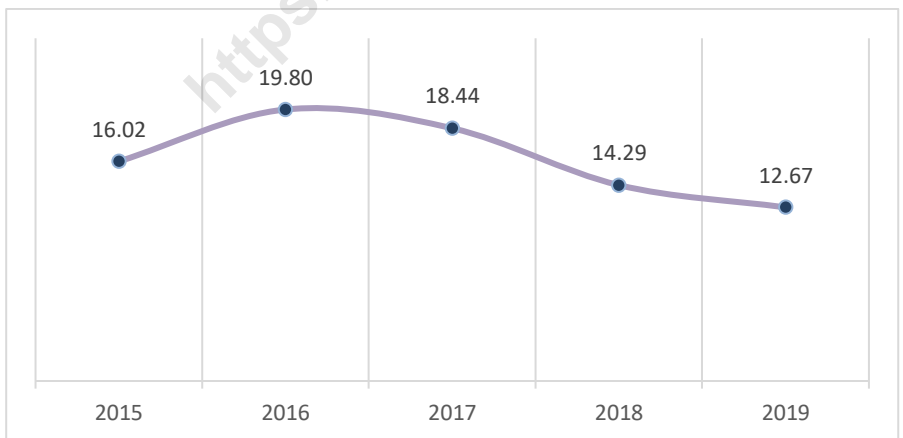
Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)





Di samping belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal. Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan *multipier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu bentuk dari belanja modal oleh pemerintah daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)





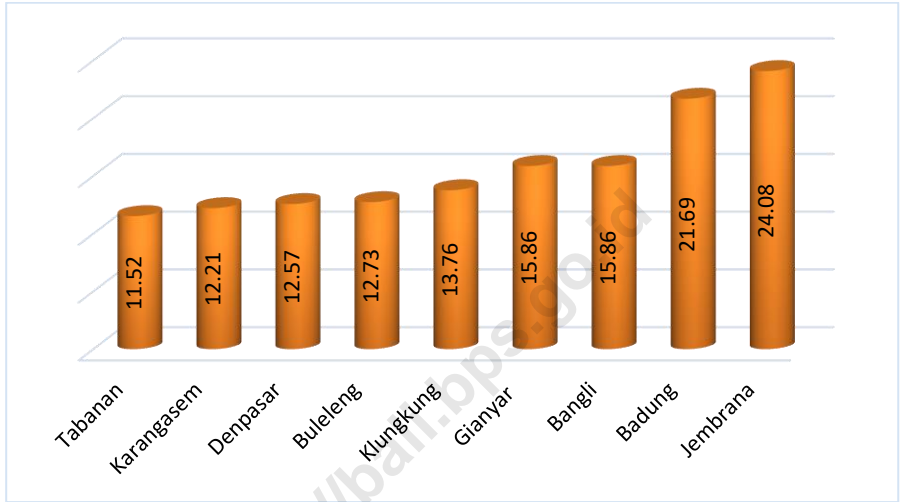
Rasio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2015 – 2019 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan trend kenaikan (gambar 11). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja selama 2015 – 2019 tercatat masih berada dibawah 20 persen, bahkan tercatat mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019.

Rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 12. Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung memiliki nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain, yaitu mencapai 24,08 persen untuk Kabupaten Jembrana dan 21,69 persen untuk Kabupaten Badung. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi. Sementara itu, Kabupaten Tabanan tercatat memiliki rata-rata rasio belanja modal per tahun yang paling rendah dalam kurun waktu 2015 – 2019, yaitu sebesar 11,52 persen. Sebagai catatan, Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan penerimaan pendapatan terbesar kelima pada tahun 2019. Sebaliknya, Kabupaten Jembrana yg memiliki rasio belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan kabupaten dengan total pendapatan daerah yang paling kecil dibandingkan dengan kabupaten/kotyanya yang lain.





Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (persen)





LAMPIRAN TABEL

<https://bali.bps.go.id>





Table 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	836,696,489	1,055,603,785	1,096,717,726	1,114,793,253	1,149,096,325
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	72,832,071	88,244,045	119,758,102	128,271,932	131,610,718
1.1 Hasil Pajak Daerah	24,286,000	31,646,000	40,469,000	43,982,006	43,982,006
1.2 Hasil Retribusi Daerah	9,575,682	9,658,801	12,963,203	16,023,015	16,045,280
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,937,000	4,028,019	6,192,679	6,192,679	6,192,679
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33,033,389	42,911,225	60,133,220	62,074,231	65,390,753
2 DANA PERIMBANGAN	29,732,457	716,423,706	754,947,556	707,552,634	727,169,242
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,442,465	20,748,312	23,086,646	22,162,154	19,926,029
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	486,895,030	562,525,134	562,525,134	552,643,376	574,864,803
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	63,039,590	133,150,260	169,335,776	132,747,104	132,378,410
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193,487,333	250,936,034	222,012,068	278,968,688	290,316,365
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	30,242,800	30,242,800
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105,791,275	131,887,498	99,204,282	100,823,541	106,143,456
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81,759,988	89,875,057	50,084,685	37,250,000	19,168,984
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	825,000	1,310,000	36,247,537	70,987,437	85,717,948
3.6 Dana Desa	0	0	0	39,664,910	49,043,178
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	5,111,070	27,863,479	36,475,565	0	0
B BELANJA DAERAH	875,100,013	1,094,006,785	1,139,911,622	1,164,958,950	1,189,005,187
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	535,450,413	607,467,723	575,436,680	552,696,350	579,540,572
1.1 Belanja Pegawai	433,300,140	491,987,486	443,112,985	417,989,209	422,192,783
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	40,468,654	13,621,044	14,210,390	10,853,148	14,782,098
1.5 Belanja Bantuan Sosial	700,000	2,880,698	2,880,698	2,880,698	4,880,698
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,826,414	15,082,796	15,957,864	16,739,632	16,952,669
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	49,755,205	83,495,699	98,874,743	103,833,663	120,332,324
1.8 Belanja Tidak Terduga	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2 BELANJA LANGSUNG	339,649,600	486,539,062	564,474,942	612,262,600	609,464,615
2.1 Belanja Pegawai	33,332,647	42,042,592	48,974,275	52,892,603	61,024,961
2.2 Belanja Barang dan Jasa	156,078,816	192,015,343	236,306,765	292,622,484	335,880,952
2.3 Belanja Modal	150,238,137	252,481,128	279,193,902	266,747,513	212,558,702
C PEMBIAYAAN	4,568,122	38,403,000	43,193,895	50,165,696	39,908,862
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48,362,528	48,385,706	53,176,602	65,811,369	45,308,862
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43,099,634	42,321,143	47,112,039	60,411,369	39,908,862
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	664,563	664,563	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	62,894	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5,200,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,959,004	9,982,706	9,982,706	15,645,672	5,400,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,759,004	4,582,706	4,582,706	10,245,672	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5,200,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0





Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,405,197,386	1,826,470,474	1,847,829,532	1,891,138,654	1,949,387,421
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	243,793,958	270,777,557	327,462,528	409,183,800	390,046,212
1.1 Hasil Pajak Daerah	84,249,480	96,019,397	96,019,397	100,639,828	105,593,392
1.2 Hasil Retribusi Daerah	41,458,781	43,362,260	21,833,196	21,952,088	18,809,485
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,046,089	7,322,114	7,322,114	8,995,685	8,385,498
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110,039,608	124,073,786	202,287,821	277,596,199	257,257,837
2 DANA PERIMBANGAN	107,177,945	1,184,284,312	1,135,165,882	1,077,346,592	1,091,284,199
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,038,891	24,580,187	27,130,191	27,630,309	22,916,176
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	722,004,642	826,283,780	826,283,780	811,768,631	835,897,238
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	59,386,100	333,420,345	281,751,911	237,947,652	232,470,785
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	356,973,795	371,408,605	385,201,122	404,608,262	468,057,010
3.1 Pendapatan Hibah	0	97,676,154	61,213,907	2,800,000	42,595,800
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	132,459,065	162,078,638	158,426,761	122,188,535	128,667,819
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	224,111,730	88,183,813	113,917,874	153,310,276	167,327,267
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	403,000	23,470,000	51,642,580	126,309,451	129,466,124
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1,429,917,386	1,870,990,474	2,103,349,532	2,126,658,654	2,222,413,784
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,045,313,438	1,233,031,906	1,127,348,308	1,157,608,398	1,144,550,059
1.1 Belanja Pegawai	878,463,853	1,007,000,725	847,890,938	843,013,938	792,139,754
1.2 Belanja Bunga	100,000	100,000	2,200,000	6,200,000	13,950,000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	41,001,813	6,684,700	38,387,000	58,902,400	61,825,800
1.5 Belanja Bantuan Sosial	9,000,000	3,300,000	3,300,000	3,700,000	3,700,000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8,668,700	13,938,166	14,417,336	14,417,336	14,417,336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	107,077,858	201,021,515	220,771,400	228,288,130	255,643,622
1.8 Belanja Tidak Terduga	1,001,214	986,800	381,634	3,086,594	2,873,547
2 BELANJA LANGSUNG	384,603,948	637,958,568	976,001,224	969,050,256	1,077,863,725
2.1 Belanja Pegawai	22,661,449	33,430,192	30,364,133	23,378,786	70,861,692
2.2 Belanja Barang dan Jasa	282,243,569	391,631,744	429,869,090	487,884,488	523,878,216
2.3 Belanja Modal	79,698,930	212,896,632	515,768,001	457,786,982	483,123,817
C PEMBIAYAAN	65,235,151	44,520,000	255,520,000	235,520,000	273,026,363
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	40,000,000	55,000,000	266,000,000	236,000,000	273,306,363
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40,000,000	55,000,000	65,000,000	35,000,000	72,306,363
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	201,000,000	201,000,000	201,000,000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15,280,000	10,480,000	10,480,000	480,000	280,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14,400,000	10,200,000	10,400,000	400,000	200,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	880,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	200,000	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	3,251,270,645	3,833,480,597	4,660,821,496	6,567,483,604	7,782,248,634
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,581,898,769	2,938,005,742	3,823,175,373	5,700,510,790	6,791,520,732
1.1 Hasil Pajak Daerah	2,302,810,000	2,562,460,318	3,308,382,257	4,989,883,606	6,235,427,022
1.2 Hasil Retribusi Daerah	75,244,749	104,699,674	101,132,656	151,097,842	186,449,053
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	111,812,395	143,726,455	237,148,583	245,533,717	160,533,337
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92,031,625	127,119,295	176,511,877	313,995,625	209,111,320
2 DANA PERIMBANGAN	55,276,625	655,497,759	628,006,623	572,651,223	610,070,331
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,789,526	84,552,733	86,179,375	88,963,842	85,374,845
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	286,763,106	336,243,365	366,684,189	330,336,650	361,230,411
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	234,701,661	175,143,059	153,350,731	163,465,075
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	319,819,244	239,977,096	209,639,499	294,321,591	380,657,571
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	73,998,200
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	164,056,474	168,881,669	161,618,880	164,302,408	172,836,452
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155,557,770	70,890,427	47,815,619	123,689,183	127,122,919
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205,000	205,000	205,000	6,330,000	6,700,000
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	3,527,203,220	4,060,564,778	5,451,343,322	7,244,394,036	7,941,248,634
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,901,565,200	2,157,154,322	2,630,541,745	3,630,743,721	4,129,089,430
1.1 Belanja Pegawai	1,117,317,956	1,216,401,160	1,310,756,526	1,505,338,879	1,685,466,946
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	5,420,000	4,550,000	9,340,792	9,527,608	11,441,488
1.4 Belanja Hibah	183,489,696	224,855,879	421,897,203	714,093,052	815,239,089
1.5 Belanja Bantuan Sosial	34,150,000	39,450,000	70,775,000	199,716,870	243,258,000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	286,013,710	338,835,264	423,163,490	628,516,450	783,499,241
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	272,173,838	330,062,018	386,308,734	563,550,861	575,184,666
1.8 Belanja Tidak Terduga	3,000,000	3,000,000	8,300,000	10,000,000	15,000,000
2 BELANJA LANGSUNG	1,625,638,020	1,903,410,456	2,820,801,577	3,613,650,315	3,812,159,204
2.1 Belanja Pegawai	66,383,972	57,957,111	85,578,001	117,256,985	133,399,068
2.2 Belanja Barang dan Jasa	569,848,140	691,839,157	1,394,196,467	1,892,631,702	2,239,136,402
2.3 Belanja Modal	989,405,908	1,153,614,187	1,341,027,109	1,603,761,628	1,439,623,734
C PEMBIAYAAN	411,341	328,747,214	790,521,826	676,910,432	159,000,000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	275,932,575	498,550,684	790,521,826	676,910,432	161,000,000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	275,932,575	498,550,684	790,521,826	676,910,432	161,000,000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	169,803,470	0	0	2,000,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	169,803,470	0	0	2,000,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	101,663,033	0	0	0





Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,339,991,864	1,623,511,105	1,754,198,696	1,926,241,277	2,305,395,146
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	370,679,368	448,142,329	610,218,628	695,786,111	989,105,503
1.1 Hasil Pajak Daerah	248,254,234	310,977,532	457,949,909	533,324,909	723,240,950
1.2 Hasil Retribusi Daerah	31,668,994	35,691,785	38,825,584	50,133,084	121,542,293
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,902,111	8,717,260	6,122,557	8,233,348	7,385,478
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80,854,029	92,755,752	107,320,578	104,094,770	136,936,782
2 DANA PERIMBANGAN	73,111,095	965,786,291	954,905,321	940,972,138	966,072,792
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24,729,422	26,587,184	30,820,114	31,070,230	28,146,253
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	641,915,439	705,975,450	705,975,450	693,573,732	716,521,199
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	233,223,657	218,109,757	216,328,176	221,405,340
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	302,667,635	209,582,485	189,074,747	289,483,029	350,216,851
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	53,527,400	53,442,266
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107,660,232	126,758,477	119,271,231	121,209,397	127,644,445
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	188,602,403	82,239,008	63,253,828	102,471,543	108,384,423
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,405,000	585,000	6,549,688	12,274,688	60,745,717
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1,445,120,459	1,916,464,409	2,088,917,280	2,112,711,371	2,662,610,318
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	993,556,610	1,096,395,236	1,101,834,394	1,219,848,473	1,354,460,087
1.1 Belanja Pegawai	838,350,786	832,679,167	791,693,231	829,135,935	906,567,762
1.2 Belanja Bunga	0	5,250,000	4,590,000	10,650,000	9,031,700
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	22,514,710	44,029,118	63,348,721	109,977,708	156,582,218
1.5 Belanja Bantuan Sosial	5,173,630	5,185,800	2,185,800	12,984,300	5,956,800
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	32,725,924	42,097,124	57,318,207	71,866,878	97,874,163
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	94,291,560	166,654,028	182,198,435	184,733,652	176,947,444
1.8 Belanja Tidak Terduga	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
2 BELANJA LANGSUNG	451,563,849	820,069,174	987,082,886	892,862,898	1,308,150,231
2.1 Belanja Pegawai	44,133,377	51,772,799	57,139,506	41,715,569	49,022,747
2.2 Belanja Barang dan Jasa	216,148,494	307,443,712	411,325,515	496,290,602	625,953,041
2.3 Belanja Modal	191,281,978	460,852,662	518,617,864	354,856,727	633,174,443
C PEMBIAYAAN	83,915,981	292,953,304	334,718,584	186,470,093	357,215,172
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	112,628,595	308,003,304	356,064,010	231,195,093	413,715,172
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	112,628,595	158,003,304	260,064,010	200,972,426	154,415,172
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	150,000,000	96,000,000	30,222,667	259,300,000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,500,000	15,050,000	21,345,426	44,725,000	56,500,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	15,050,000	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,500,000	0	0	16,600,000	19,000,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	17,970,426	28,125,000	37,500,000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	3,375,000	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Table 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

	Rincian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	PENDAPATAN DAERAH	838,871,569	1,067,796,991	1,032,084,018	1,094,682,989	1,169,387,903
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,563,450	121,979,255	124,016,073	152,478,228	179,552,309
1.1	Hasil Pajak Daerah	17,038,900	35,943,923	34,078,743	44,515,847	56,436,034
1.2	Hasil Retribusi Daerah	19,609,138	21,841,439	26,594,177	25,751,986	28,813,972
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,101,503	7,773,398	8,170,275	8,170,595	8,101,470
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,813,909	56,420,495	55,172,878	74,039,800	86,200,833
2	DANA PERIMBANGAN	39,436,391	714,620,572	673,758,014	680,647,356	701,816,500
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,650,569	20,406,590	22,492,122	21,784,414	19,219,589
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	484,541,151	539,855,201	539,855,201	530,371,681	554,206,328
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	54,045,790	154,358,781	111,410,691	128,491,261	128,390,583
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192,070,609	231,197,165	234,309,931	261,557,405	288,019,094
3.1	Pendapatan Hibah	0	33,633,600	4,800,000	27,736,320	27,680,000
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78,500,342	130,084,428	113,391,928	86,364,064	90,973,592
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98,167,267	34,259,137	95,883,195	78,016,021	98,558,442
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,403,000	33,220,000	20,234,808	69,441,000	70,807,060
3.6	Dana Desa	-	-	-	0	0
3.7	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B	BELANJA DAERAH	912,707,523	1,216,958,321	1,146,303,633	1,218,103,633	1,243,794,514
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	597,789,006	620,162,388	634,019,416	631,536,091	697,482,151
1.1	Belanja Pegawai	490,736,393	503,390,607	481,812,398	475,157,151	529,556,323
1.2	Belanja Bunga	0	0	2,000,000	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4	Belanja Hibah	37,993,734	3,432,200	38,123,494	42,082,279	44,808,292
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,662,500	2,698,000	0	0	0
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7,447,241	7,246,883	6,067,292	7,028,000	8,525,002
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	59,649,138	96,463,939	104,304,429	107,268,661	114,092,534
1.8	Belanja Tidak Terduga	300,000	6,930,759	1,711,803	0	500,000
2	BELANJA LANGSUNG	314,918,517	596,795,933	512,284,217	586,567,542	546,312,363
2.1	Belanja Pegawai	14,046,907	23,911,163	20,031,093	20,235,622	6,734,100
2.2	Belanja Barang dan Jasa	175,184,539	325,727,702	297,666,297	394,557,980	377,235,858
2.3	Belanja Modal	125,687,071	247,157,069	194,586,827	171,773,940	162,342,405
C	PEMBIAYAAN	13,008,529	149,161,330	114,219,615	123,420,644	74,406,611
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76,210,954	155,886,330	122,244,615	131,420,644	79,406,611
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,835,954	154,861,330	102,244,615	131,420,644	78,656,611
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	20,000,000	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8	Lainnya	375,000	1,025,000	0	0	750,000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,375,000	6,725,000	8,025,000	8,000,000	5,000,000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	5,000,000
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,375,000	6,725,000	8,025,000	8,000,000	0
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5	Lainnya	0	0	0	0	0
D	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Table 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	826,028,973	1,030,680,245	1,066,943,918	1,118,895,723	1,210,206,465
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	82,000,000	92,000,000	117,500,000	120,500,000	139,180,771
1.1 Hasil Pajak Daerah	10,241,554	12,333,000	14,982,887	16,268,930	19,802,415
1.2 Hasil Retribusi Daerah	22,252,888	22,054,154	28,284,993	26,332,175	30,263,129
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,318,478	3,115,143	5,110,553	5,931,700	5,832,978
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46,187,080	54,497,703	69,121,567	71,967,195	83,282,249
2 DANA PERIMBANGAN	44,715,580	772,968,948	763,517,158	734,566,997	749,194,930
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19,079,052	19,142,433	21,192,135	21,005,964	18,576,708
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	499,734,801	568,278,934	568,278,934	559,867,699	584,470,785
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	55,096,890	185,547,581	174,046,089	153,693,334	146,147,437
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	170,118,230	165,711,297	185,926,760	263,828,726	321,830,764
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	30,062,670
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80,308,152	117,900,992	116,617,667	87,183,185	91,707,101
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86,367,248	43,090,305	55,783,753	104,826,236	104,233,323
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,442,830	4,720,000	13,625,340	71,819,305	95,827,670
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	930,895,765	1,135,996,245	1,137,341,371	1,304,088,934	1,360,106,465
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	662,045,111	694,104,942	628,256,778	786,496,573	819,161,569
1.1 Belanja Pegawai	531,937,565	576,004,084	446,464,222	524,139,212	536,882,240
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	41,927,000	685,000	9,676,835	10,856,819	16,594,411
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1,300,000	0	0	0	350,000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,300,444	3,439,215	4,326,789	4,260,111	5,006,554
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	82,680,102	112,976,643	166,788,932	246,240,431	259,328,364
1.8 Belanja Tidak Terduga	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2 BELANJA LANGSUNG	268,850,654	441,891,303	509,084,593	517,592,361	540,944,896
2.1 Belanja Pegawai	48,455,058	61,418,633	56,811,196	51,213,300	58,654,818
2.2 Belanja Barang dan Jasa	124,704,281	153,360,232	170,051,948	200,479,268	245,213,259
2.3 Belanja Modal	95,691,315	227,112,438	282,221,449	265,899,793	237,076,819
C PEMBIAYAAN	2,741,893	105,316,000	70,397,453	185,193,211	149,900,000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	104,866,792	110,000,000	70,397,453	185,193,211	149,900,000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	104,866,792	110,000,000	70,397,453	185,193,211	119,900,000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	30,000,000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	4,684,000	0	0	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	4,684,000	0	0	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,226,081,077	1,766,956,768	1,553,327,398	1,561,878,043	1,689,288,574
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	205,273,392	233,609,397	233,653,020	234,000,000	276,362,655
1.1 Hasil Pajak Daerah	125,839,116	134,299,663	138,301,371	116,501,484	149,125,711
1.2 Hasil Retribusi Daerah	10,236,014	12,098,415	11,236,990	18,362,770	26,200,917
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,633,230	12,333,527	12,862,601	11,741,522	11,055,640
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54,565,032	74,877,792	71,252,058	87,394,224	89,980,387
2 DANA PERIMBANGAN	50,855,032	1,258,489,522	974,180,548	953,288,305	1,012,654,002
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,024,006	23,084,489	25,557,964	23,994,833	21,770,469
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	633,241,287	732,963,859	759,506,567	729,378,991	771,789,284
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	69,845,030	502,441,174	189,116,017	199,914,481	219,094,249
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	294,697,362	274,857,849	345,493,830	374,589,738	400,271,917
3.1 Pendapatan Hibah	0	64,381,193	56,872,100	56,872,100	56,872,100
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91,401,629	109,637,535	112,994,623	114,854,629	121,056,629
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	166,686,741	49,301,984	71,182,742	99,626,212	110,032,889
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,608,992	51,537,137	104,444,365	103,236,797	112,310,299
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1,269,495,869	1,811,460,388	1,573,795,980	1,598,133,043	1,760,956,571
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	895,592,830	1,194,242,956	891,028,314	936,156,926	994,547,694
1.1 Belanja Pegawai	721,799,958	1,011,539,063	698,490,517	713,450,212	743,863,518
1.2 Belanja Bunga	8,165,000	5,000,000	1,500,000	100,000	100,000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	42,556,326	2,980,500	12,063,000	7,143,000	11,908,000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3,242,000	955,000	1,810,000	24,650,000	25,500,000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,607,513	14,639,808	14,953,836	17,532,353	22,792,461
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	103,222,033	157,128,585	160,210,961	165,281,360	186,383,715
1.8 Belanja Tidak Terduga	3,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000	4,000,000
2 BELANJA LANGSUNG	373,903,039	617,217,432	682,767,666	661,976,118	766,408,877
2.1 Belanja Pegawai	20,644,145	29,605,535	39,709,286	37,757,796	23,983,987
2.2 Belanja Barang dan Jasa	236,147,176	344,268,642	408,098,356	437,427,670	538,315,144
2.3 Belanja Modal	117,111,718	243,343,256	234,960,024	186,790,652	204,109,746
C PEMBIAYAAN	16,680,763	44,503,620	20,468,582	36,255,000	71,667,997
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	72,795,932	73,003,620	45,068,582	40,000,000	78,062,997
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72,795,932	73,003,620	45,068,582	40,000,000	78,062,997
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29,381,140	28,500,000	24,600,000	3,745,000	6,395,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,368,140	4,500,000	3,600,000	3,600,000	6,250,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	25,013,000	24,000,000	21,000,000	145,000	145,000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0





Table 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,668,718,324	2,082,621,121	2,157,390,809	2,124,617,362	2,371,246,687
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	221,903,000	273,607,818	351,807,706	371,366,874	440,092,905
1.1 Hasil Pajak Daerah	85,782,281	115,956,038	143,297,958	151,462,856	174,650,000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	13,018,096	18,359,171	20,486,873	21,511,113	24,650,000
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,961,901	13,329,765	15,029,632	15,750,000	16,150,000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111,140,722	125,962,844	172,993,243	182,642,905	224,642,905
2 DANA PERIMBANGAN	99,931,800	1,364,898,869	1,338,584,136	1,270,128,889	1,332,815,878
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,629,377	32,090,906	35,522,652	33,962,198	28,149,640
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	868,511,959	982,698,080	982,698,080	965,435,235	998,167,419
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	74,876,950	350,109,883	320,363,404	270,731,456	306,498,819
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	469,797,038	444,114,434	466,998,967	483,121,599	598,337,904
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	88,801,600	88,801,600
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	172,687,624	198,737,341	199,809,021	148,675,384	171,649,687
3.4 Dana Penyeuaian dan Otonomi Khusus	281,331,752	210,322,093	249,994,837	141,632,607	167,829,785
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,777,662	35,055,000	17,195,109	104,012,008	170,056,832
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1,785,202,066	2,156,911,480	2,145,790,809	2,159,920,047	2,410,385,774
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,176,323,664	1,281,299,177	1,176,666,558	1,164,553,107	1,220,189,674
1.1 Belanja Pegawai	982,146,961	996,202,896	818,897,684	822,928,380	858,140,499
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	35,329,407	39,889,310	93,137,600	71,129,275	90,733,950
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4,765,000	150,000	811,000	28,454,000	7,192,600
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,880,038	13,431,521	16,400,000	17,297,397	19,930,000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	138,942,445	230,027,309	245,169,716	220,214,771	240,125,308
1.8 Belanja Tidak Terduga	5,259,813	1,598,141	2,250,558	4,529,284	4,067,317
2 BELANJA LANGSUNG	608,878,402	875,612,303	969,124,251	995,366,940	1,190,196,100
2.1 Belanja Pegawai	31,674,659	49,241,794	58,257,547	61,176,978	50,142,820
2.2 Belanja Barang dan Jasa	343,487,160	520,050,860	630,357,395	691,503,323	769,565,310
2.3 Belanja Modal	233,716,583	306,319,650	280,509,309	242,686,639	370,487,970
C PEMBIAYAAN	17,209,024	74,290,359	-11,600,000	35,302,685	39,139,087
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	127,133,742	84,590,359	0	57,302,685	51,696,530
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	127,133,742	84,590,359	0	57,302,685	51,696,530
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,650,000	10,300,000	11,600,000	22,000,000	12,557,443
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	10,300,000	0	0	0
2.2 Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,650,000	0	11,600,000	22,000,000	12,557,443
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Table 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,725,426,452	2,014,147,069	1,917,638,288	2,040,573,867	2,120,428,396
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	681,259,855	715,452,848	805,299,902	808,925,880	872,497,728
1.1 Hasil Pajak Daerah	523,978,712	533,177,648	577,409,173	590,500,000	663,200,000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	44,029,560	46,231,038	45,463,880	35,035,380	25,422,380
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24,531,583	25,758,162	38,614,201	48,460,500	45,987,348
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88,720,000	110,286,000	143,812,649	134,930,000	137,888,000
2 DANA PERIMBANGAN	76,600,000	1,087,392,416	913,883,197	908,579,249	916,917,559
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71,101,582	85,655,993	96,679,366	102,975,626	87,932,022
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	625,978,507	661,794,756	661,794,765	650,169,150	677,033,111
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	5,226,190	339,941,667	155,409,066	155,434,473	151,952,426
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	341,860,318	211,301,805	198,455,189	323,068,738	331,013,109
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	99,465,800	99,465,800
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	158,753,502	184,188,800	160,963,373	163,597,963	171,721,067
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182,856,816	26,863,005	7,500,000	0	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	250,000	250,000	29,991,816	5,350,000	6,197,000
3.6 Dana Desa	0	0	0	27,404,975	34,750,461
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	27,250,000	18,878,781
B BELANJA DAERAH	1,760,606,869	2,126,032,569	2,055,069,223	2,200,039,867	2,376,428,396
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,016,504,141	1,241,083,854	1,045,037,374	1,134,456,373	1,142,088,783
1.1 Belanja Pegawai	830,056,405	991,172,729	782,708,053	835,074,049	859,613,518
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	72,361,689	34,097,575	61,824,414	99,652,000	81,405,858
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2,672,913	2,672,913	3,498,000	4,498,000	5,198,000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	29,044,000	57,940,869	62,042,817	62,553,538	68,862,238
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	79,369,134	152,199,768	131,964,090	129,678,786	122,009,169
1.8 Belanja Tidak Terduga	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000
2 BELANJA LANGSUNG	744,102,728	884,948,715	1,010,031,849	1,065,583,494	1,234,339,613
2.1 Belanja Pegawai	17,674,915	21,132,491	25,710,394	20,891,997	17,573,090
2.2 Belanja Barang dan Jasa	516,563,756	577,298,327	612,276,065	755,258,758	863,040,304
2.3 Belanja Modal	209,864,057	286,517,897	372,045,390	289,432,739	353,726,219
C PEMBIAYAAN	11,861,634	111,885,500	137,430,935	159,466,000	256,000,000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100,000,000	122,385,500	159,913,672	164,000,000	259,000,000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100,000,000	122,385,500	100,000,000	164,000,000	259,000,000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	59,913,672	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	64,819,583	10,500,000	22,482,737	4,534,000	3,000,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	64,819,583	10,500,000	10,500,000	4,534,000	3,000,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	11,982,737	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0





Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	903,622,270	1,090,625,089	1,186,843,211	1,096,498,631	1,144,974,583
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	98,032,646	114,533,487	121,342,475	126,477,267	133,698,784
1.1 Hasil Pajak Daerah	32,861,322	33,964,149	35,515,927	34,940,515	39,132,640
1.2 Hasil Retribusi Daerah	8,925,326	10,241,922	9,191,266	9,669,791	9,869,996
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,912,892	6,183,844	6,189,438	6,078,926	7,549,856
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51,333,106	64,143,572	70,445,844	75,788,035	77,146,292
2 DANA PERIMBANGAN	577,461,799	707,078,035	727,758,128	693,195,696	707,790,157
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,688,309	20,162,001	20,189,436	19,145,766	15,038,091
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	486,895,030	562,525,134	552,643,376	552,328,680	573,014,113
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	74,878,460	124,390,900	154,925,317	121,721,251	119,737,953
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	228,127,824	269,013,568	337,742,608	276,825,668	303,485,642
3.1 Pendapatan Hibah	0	58,787,556	30,107,587	29,669,024	30,386,400
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	131,798,589	101,663,393	99,899,938	109,752,839	118,190,797
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83,094,188	53,112,041	50,084,685	37,250,000	19,168,984
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	825,000	27,587,098	117,505,880	60,762,081	86,696,283
3.6 Dana Desa	0	0	0	39,391,724	49,043,178
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,410,047	27,863,479	40,144,518	0	0
B BELANJA DAERAH	885,633,184	1,128,489,214	1,038,782,384	1,217,106,320	1,158,591,599
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	506,733,928	520,560,153	495,845,593	527,066,694	557,479,605
1.1 Belanja Pegawai	397,650,714	410,511,394	353,743,177	373,431,056	379,798,329
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	39,120,670	10,823,752	13,498,910	15,558,271	19,083,578
1.5 Belanja Bantuan Sosial	225,333	455,598	4,115,375	4,909,125	20,460,346
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,099,594	15,736,498	16,827,960	17,636,779	17,924,105
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	56,636,018	83,032,913	107,660,170	115,527,688	120,159,454
1.8 Belanja Tidak Terduga	1,599	0	0	3,776	53,793
2 BELANJA LANGSUNG	378,899,256	607,929,061	542,936,791	690,039,626	601,111,994
2.1 Belanja Pegawai	31,514,727	53,011,013	48,635,739	52,204,381	56,242,682
2.2 Belanja Barang dan Jasa	161,433,363	230,285,169	250,560,197	293,182,626	326,474,173
2.3 Belanja Modal	185,951,166	324,632,880	243,740,854	344,652,618	218,395,139
C PEMBIAYAAN	115,887,900	115,089,511	71,934,879	208,295,707	89,368,576
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124,437,900	132,008,467	79,834,879	219,995,707	92,468,576
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	119,332,767	132,008,467	76,876,879	219,995,707	87,668,576
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	105,133	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5,000,000	0	2,958,000	0	4,800,000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,550,000	16,918,956	7,900,000	11,700,000	3,100,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,550,000	16,918,956	5,000,000	10,000,000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	3,100,000
2.5 Lainnya	5,000,000	0	2,900,000	1,700,000	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	133,876,986	77,225,386	219,995,707	87,688,018	75,751,559



Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,615,933,308	1,794,601,450	1,871,864,103	1,862,277,204	1,926,615,983
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	300,799,020	318,083,799	426,635,751	363,370,469	354,558,239
1.1 Hasil Pajak Daerah	105,792,993	105,186,643	128,176,142	97,930,045	116,003,788
1.2 Hasil Retribusi Daerah	47,030,646	22,397,630	20,466,249	29,213,425	23,362,356
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,322,114	8,741,999	10,385,423	9,673,604	9,937,546
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140,653,267	181,757,527	267,607,937	226,553,395	205,254,549
2 DANA PERIMBANGAN	815,846,445	1,102,265,093	1,096,289,816	1,063,464,922	1,075,691,158
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17,441,963	23,775,525	23,944,695	23,104,621	16,638,025
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	722,004,642	826,283,780	811,768,631	811,768,631	847,281,658
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	76,399,840	252,205,788	260,576,490	228,591,670	211,771,475
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	499,287,843	374,252,558	348,938,536	435,441,813	496,366,586
3.1 Pendapatan Hibah	93,214,569	101,080,965	5,645,303	44,063,419	44,213,011
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	157,674,595	113,082,190	131,145,049	133,166,486	143,315,226
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247,995,679	88,183,813	113,917,874	152,721,992	49,122,725
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	403,000	22,969,446	98,230,310	105,489,916	141,511,082
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	118,204,542
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	48,936,144	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1,586,227,841	1,873,464,986	1,861,962,380	1,909,975,376	1,926,055,006
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,050,345,518	1,172,428,439	1,116,208,096	1,166,534,746	1,146,283,679
1.1 Belanja Pegawai	824,144,117	910,740,328	804,449,867	826,488,843	789,294,475
1.2 Belanja Bunga	44,197	31,394	13,536	2,020,960	7,340
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	45,344,113	37,395,400	67,797,086	91,043,713	69,659,159
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3,204,500	2,926,000	2,999,500	4,278,000	18,355,000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,978,454	14,417,336	14,417,336	14,417,336	14,417,336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	164,630,137	206,136,049	226,438,571	228,285,894	254,550,369
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	781,932	92,200	0	0
2 BELANJA LANGSUNG	535,882,323	701,036,547	745,754,284	743,440,630	779,771,327
2.1 Belanja Pegawai	33,905,165	27,146,895	22,159,485	109,090,594	73,262,895
2.2 Belanja Barang dan Jasa	389,007,715	416,829,978	433,029,612	416,110,096	519,328,057
2.3 Belanja Modal	112,969,443	257,059,674	290,565,187	218,239,940	187,182,375
C PEMBIAYAAN	117,690,293	146,569,365	55,422,906	65,395,817	17,587,782
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	121,968,328	148,047,400	65,850,941	65,723,852	69,265,817
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	121,329,374	147,395,730	65,213,158	65,324,629	17,697,644
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	51,400,000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	638,954	651,670	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	637,783	399,223	168,173
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,278,035	1,478,035	10,428,035	328,035	51,678,035
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	200,000	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000	1,200,000	10,350,000	250,000	200,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	78,035	78,035	78,035	78,035	51,478,035
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	200,000	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	147,395,760	67,705,829	65,324,629	17,697,645	18,148,759



Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	3,735,129,565	4,328,245,676	4,939,386,134	5,420,009,298	5,792,967,591
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,001,464,263	3,563,589,483	4,172,457,396	4,555,716,407	4,835,188,460
1.1 Hasil Pajak Daerah	2,598,718,130	2,968,152,918	3,490,156,150	3,872,911,783	4,217,319,393
1.2 Hasil Retribusi Daerah	96,040,159	118,514,066	128,717,148	135,908,890	148,048,411
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	142,995,660	186,013,183	255,932,876	238,041,274	231,890,544
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163,710,314	290,909,316	297,651,222	308,854,461	237,930,112
2 DANA PERIMBANGAN	332,251,562	543,323,025	555,889,277	558,028,882	568,230,993
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44,947,526	78,823,886	73,843,812	80,192,486	61,162,552
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	286,763,106	336,243,365	330,336,650	330,336,650	361,230,411
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	540,930	128,255,774	151,708,815	147,499,746	145,838,030
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	401,413,740	221,333,168	211,039,461	306,264,009	389,548,138
3.1 Pendapatan Hibah	75,091,364	0	1,779,222	0	255,725,219
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	162,799,634	150,237,741	56,696,422	176,381,419	0
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	163,317,741	70,890,427	47,815,619	123,552,590	127,122,919
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205,000	205,000	104,748,198	6,330,000	6,700,000
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	3,446,634,315	4,162,119,988	5,413,936,423	5,799,584,400	5,733,782,645
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,909,366,328	2,100,194,081	2,758,358,887	3,224,366,105	3,036,047,768
1.1 Belanja Pegawai	1,035,507,051	1,094,429,122	1,186,173,131	1,357,920,767	1,335,078,328
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	5,393,600	4,378,338	7,476,568	5,770,880	5,167,970
1.4 Belanja Hibah	144,802,581	186,856,128	500,440,836	794,612,019	371,046,650
1.5 Belanja Bantuan Sosial	26,839,800	43,116,500	100,802,395	223,693,798	244,376,900
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	332,221,197	385,408,982	493,114,327	505,025,847	578,667,917
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	364,602,099	385,529,239	458,163,692	328,671,644	491,303,973
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	475,772	12,187,940	8,671,149	10,406,029
2 BELANJA LANGSUNG	1,537,267,986	2,061,925,907	2,655,577,536	2,575,218,295	2,697,734,877
2.1 Belanja Pegawai	59,742,497	52,697,107	106,950,527	107,521,240	125,443,882
2.2 Belanja Barang dan Jasa	554,753,161	814,112,678	1,307,515,345	1,560,931,093	1,747,622,980
2.3 Belanja Modal	922,772,328	1,195,116,122	1,241,111,665	906,765,962	824,668,016
C PEMBIAYAAN	625,326,073	910,007,075	1,075,636,186	600,981,412	219,590,261
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	925,326,073	914,810,545	1,076,416,778	600,981,412	221,590,261
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	923,705,992	913,860,040	1,076,132,762	600,948,966	221,406,311
1.2 Pencairan Dana Cadangan	455,618	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1,164,463	0	284,016	31,667	183,950
1.8 Lainnya	0	950,505	0	780	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	300,000,000	4,803,470	780,592	0	2,000,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	300,000,000	4,803,470	0	0	2,000,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	780,592	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	913,821,324	1,076,132,762	601,085,896	221,406,311	278,775,207



Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,527,797,536	1,682,778,978	1,808,814,501	2,002,646,874	2,307,617,711
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	457,321,018	529,864,618	662,753,475	770,204,849	997,478,368
1.1 Hasil Pajak Daerah	307,668,563	372,927,608	484,010,689	578,938,948	742,538,741
1.2 Hasil Retribusi Daerah	40,055,120	40,756,608	39,281,032	49,427,670	98,622,584
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,530,611	8,248,444	7,709,528	7,875,922	10,574,498
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102,066,724	107,931,958	131,752,226	133,962,309	145,742,545
2 DANA PERIMBANGAN	673,568,860	905,918,780	916,514,053	928,953,908	940,139,489
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,983,901	27,323,005	26,054,640	27,454,452	20,835,073
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	641,915,439	705,975,450	693,573,732	693,573,732	716,521,199
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	12,669,520	172,620,325	196,885,681	207,925,724	202,783,217
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	396,907,658	246,995,580	229,546,974	303,488,117	369,999,854
3.1 Pendapatan Hibah	71,207,425	53,599,850	41,474,200	56,216,160	61,397,292
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	121,995,559	110,404,608	119,285,958	132,021,258	142,350,998
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	198,962,709	82,239,008	63,253,828	102,471,543	108,384,423
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,741,965	560,823	5,532,988	12,779,156	57,867,141
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	191,292	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1,504,436,669	1,786,411,745	1,922,948,830	2,046,852,685	2,228,232,094
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	936,408,399	1,074,627,473	1,067,478,185	1,249,937,001	1,326,572,057
1.1 Belanja Pegawai	766,423,103	789,248,493	709,640,772	832,708,142	821,451,951
1.2 Belanja Bunga	0	0	2,969,125	9,197,193	9,206,814
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	24,717,940	50,029,224	109,963,202	137,771,901	189,250,500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	5,172,084	2,018,306	1,761,596	9,398,337	9,419,311
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31,719,899	47,086,496	60,677,964	82,247,626	120,217,474
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	107,944,073	185,620,386	182,284,687	178,613,802	177,026,007
1.8 Belanja Tidak Terduga	431,300	624,567	180,839	0	0
2 BELANJA LANGSUNG	568,028,270	711,784,273	855,470,645	796,915,684	901,660,037
2.1 Belanja Pegawai	48,670,764	54,456,292	46,593,520	38,693,988	44,045,063
2.2 Belanja Barang dan Jasa	295,175,011	347,410,368	399,516,602	461,195,235	607,262,533
2.3 Belanja Modal	224,182,495	309,917,612	409,360,523	297,026,461	250,352,441
C PEMBIAYAAN	227,478,093	235,479,596	227,759,613	96,130,802	12,944,538
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	239,737,667	250,838,960	245,730,039	140,280,570	69,444,538
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	239,737,667	250,838,960	131,864,502	113,625,285	51,925,280
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	113,865,537	26,654,186	17,519,258
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	1,099	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,259,574	15,359,364	17,970,426	44,149,768	56,500,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,259,574	15,050,000	17,970,426	6,000,000	19,000,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	28,125,000	37,500,000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	309,364	0	10,024,768	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	250,838,960	131,846,829	113,625,285	51,924,991	92,330,155



Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	907,139,632	1,062,218,238	1,098,938,730	1,100,138,936	1,215,589,170
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	120,035,996	134,142,054	153,210,776	186,974,284	225,063,772
1.1 Hasil Pajak Daerah	34,668,113	43,744,803	53,457,710	60,606,210	77,608,057
1.2 Hasil Retribusi Daerah	21,776,641	21,874,454	22,978,426	22,707,456	39,956,311
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,164,793	7,778,148	8,008,286	7,863,919	8,429,501
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56,426,449	60,744,649	68,766,354	95,796,698	99,069,902
2 DANA PERIMBANGAN	542,012,560	699,514,521	653,544,539	669,716,216	692,588,596
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14,233,393	19,439,467	20,319,282	18,401,278	13,318,909
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	484,541,151	539,855,201	530,371,681	530,371,681	564,462,148
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	43,238,016	140,219,853	102,853,576	120,943,258	114,807,539
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245,091,076	228,561,663	292,183,415	243,448,436	297,936,802
3.1 Pendapatan Hibah	23,770,800	24,629,750	26,622,520	22,615,334	26,442,280
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	115,063,231	117,416,482	95,060,573	94,025,543	101,474,011
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	105,854,045	34,259,137	0	78,026,499	98,558,442
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	403,000	17,997,157	74,617,101	48,781,060	71,462,069
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	34,259,137	95,883,221	0	0
B BELANJA DAERAH	890,952,557	971,294,294	1,131,544,237	1,146,817,490	1,195,465,144
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	572,974,721	585,085,208	628,409,523	644,691,461	677,296,378
1.1 Belanja Pegawai	456,198,002	477,641,196	456,967,596	469,194,072	504,748,242
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	23,164
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	34,722,283	2,649,800	59,623,733	58,807,807	47,356,862
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1,511,500	1,926,000	0	2,097,825	1,900,600
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8,354,294	6,650,221	7,827,433	7,814,618	9,270,547
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	72,188,642	96,110,002	103,716,413	106,777,139	113,996,963
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	107,990	274,348	0	0
2 BELANJA LANGSUNG	317,977,836	386,209,085	503,134,714	502,126,029	518,168,766
2.1 Belanja Pegawai	16,865,673	20,600,125	19,193,903	17,755,621	5,543,901
2.2 Belanja Barang dan Jasa	181,773,764	221,501,353	295,144,509	334,519,452	383,190,762
2.3 Belanja Modal	119,338,399	144,107,607	188,796,302	149,850,956	129,434,103
C PEMBIAYAAN	138,677,227	149,867,330	108,594,136	70,311,736	20,075,534
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	142,277,227	154,861,330	115,919,136	76,811,736	29,975,534
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	141,802,227	154,861,330	115,644,136	76,011,736	23,775,534
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	4,900,000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	800,000	1,300,000
1.8 Lainnya	475,000	0	275,000	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,600,000	4,994,000	7,325,000	6,500,000	9,900,000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	3,600,000	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	4,994,000	7,325,000	6,500,000	5,000,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	4,900,000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	154,864,302	240,791,274	75,988,629	23,633,183	40,199,560



Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2017	2018
A PENDAPATAN DAERAH	873,469,027	1,040,303,804	1,093,254,986	1,106,097,725	1,180,012,548
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,731,141	104,829,402	104,592,348	122,686,254	127,040,436
1.1 Hasil Pajak Daerah	12,557,945	16,048,826	16,629,094	20,736,560	22,363,776
1.2 Hasil Retribusi Daerah	18,566,238	25,553,072	23,456,808	21,326,372	36,441,476
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,008,691	4,815,356	5,243,193	6,956,253	6,139,576
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,598,267	58,412,148	59,263,253	73,667,069	62,095,608
2 DANA PERIMBANGAN	569,345,606	752,414,034	736,569,769	688,033,257	717,603,942
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14,512,035	19,060,280	19,962,147	17,645,555	13,736,931
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	499,734,801	568,278,943	558,296,101	559,422,439	584,470,785
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	55,098,770	165,074,811	158,311,521	110,965,263	119,396,226
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216,392,280	183,060,368	252,092,869	295,378,214	335,368,170
3.1 Pendapatan Hibah	0	10,215,971	29,404,960	29,340,029	40,340,496
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117,658,813	125,465,705	95,367,699	93,517,971	102,144,469
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96,577,827	0	0	0	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,155,640	4,288,387	71,536,502	67,662,544	88,649,882
3.6 Dana Desa	0	0	0	52,857,670	61,334,645
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	43,090,305	55,783,708	52,000,000	42,898,678
B BELANJA DAERAH	899,776,029	1,089,450,148	1,021,996,019	1,171,071,638	1,161,031,649
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	616,282,161	646,035,803	646,722,405	783,014,484	734,309,553
1.1 Belanja Pegawai	475,644,606	518,950,035	444,993,765	482,322,601	506,370,160
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	45,155,081	8,239,307	17,610,320	28,981,450	18,346,148
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1,080,000	2,214,280	3,854,024	3,095,000	342,800
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,335,672	3,709,836	4,326,734	4,260,111	5,759,779
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	91,066,802	112,855,906	175,738,250	264,355,322	203,490,666
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	66,440	199,312	0	0
2 BELANJA LANGSUNG	283,493,868	443,414,345	375,273,614	388,057,154	426,722,096
2.1 Belanja Pegawai	46,406,486	61,246,105	60,063,422	50,198,219	56,572,021
2.2 Belanja Barang dan Jasa	126,373,661	131,942,216	156,599,346	156,657,374	218,885,726
2.3 Belanja Modal	110,713,721	250,226,024	158,610,846	181,201,561	151,264,349
C PEMBIAYAAN	127,941,507	86,555,239	31,649,497	102,910,529	37,936,616
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	127,941,507	103,455,210	37,012,847	102,910,529	37,936,616
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	127,941,507	103,455,210	37,012,847	102,910,529	37,936,616
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	16,899,971	5,363,350	0	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	16,899,971	5,363,350	0	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	101,634,505	37,408,895	102,908,464	37,936,616	56,917,515



Table 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,367,577,564	1,462,024,349	1,525,846,347	1,482,949,917	1,648,390,692
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	243,125,914	232,644,013	198,575,057	200,361,247	233,013,033
1.1 Hasil Pajak Daerah	139,626,191	117,782,188	96,850,262	91,995,241	108,373,665
1.2 Hasil Retribusi Daerah	14,255,154	15,984,975	12,579,622	13,199,321	13,046,348
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,535,055	13,592,314	11,519,621	10,750,651	11,633,177
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75,709,514	85,284,536	77,625,552	84,416,034	99,959,842
2 DANA PERIMBANGAN	706,426,130	937,628,022	949,134,029	937,885,910	1,011,875,538
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17,307,499	22,447,406	23,233,118	20,959,758	15,657,058
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	633,241,287	732,963,859	722,184,384	729,378,991	795,849,744
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	55,877,344	182,216,757	203,716,527	187,547,161	200,368,736
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	418,025,520	291,752,310	378,137,261	344,702,760	403,502,121
3.1 Pendapatan Hibah	79,127,259	73,937,390	57,937,129	57,763,757	61,059,510
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105,387,045	102,832,588	115,364,651	125,012,273	135,036,636
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	178,178,534	49,301,984	71,182,742	99,489,619	110,032,889
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55,317,714	65,670,951	130,625,907	59,442,092	97,337,496
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	14,968	9,401	3,026,832	2,995,019	35,590
B BELANJA DAERAH	1,351,846,275	1,450,662,759	1,506,221,683	1,480,600,621	1,654,068,655
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	889,847,572	929,460,208	879,475,826	899,612,964	947,820,650
1.1 Belanja Pegawai	703,046,385	748,260,250	689,865,417	710,839,018	717,697,121
1.2 Belanja Bunga	4,458,177	2,580,813	633,650	22,985	13,464
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	41,061,315	5,882,089	11,370,600	6,151,450	14,763,150
1.5 Belanja Bantuan Sosial	675,828	901,010	1,461,164	2,144,566	22,591,164
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16,286,253	13,730,310	9,484,944	13,260,787	13,565,839
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	123,735,350	158,105,736	165,834,010	164,631,943	179,189,912
1.8 Belanja Tidak Terduga	584,264	0	826,041	2,562,215	0
2 BELANJA LANGSUNG	461,998,703	521,202,550	626,745,857	580,987,657	706,248,004
2.1 Belanja Pegawai	27,540,823	30,270,433	22,141,110	25,041,533	33,658,827
2.2 Belanja Barang dan Jasa	256,033,241	300,494,138	367,534,861	411,039,361	520,356,505
2.3 Belanja Modal	178,424,639	190,437,979	237,069,886	144,906,763	152,232,673
C PEMBIAYAAN	127,129,691	114,446,431	102,921,920	118,476,077	114,461,003
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155,856,074	142,694,804	125,692,990	122,206,950	120,841,876
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155,844,274	142,685,297	125,641,509	122,184,280	120,826,153
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	11,800	0	51,481	0	15,723
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	9,507	0	22,670	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	28,726,383	28,248,373	22,771,070	3,730,873	6,380,873
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,978,010	4,500,000	3,600,000	3,600,000	6,250,000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	23,748,373	23,748,373	19,171,070	130,873	130,873
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	142,860,980	125,808,022	122,546,584	120,825,373	108,783,041



Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,937,771,345	2,066,173,156	2,200,113,190	2,052,836,001	2,318,758,511
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	293,038,467	282,113,900	455,195,426	335,555,494	365,595,301
1.1 Hasil Pajak Daerah	110,723,083	102,239,173	124,234,062	133,652,474	155,755,835
1.2 Hasil Retribusi Daerah	19,944,242	15,129,372	17,076,084	19,056,987	20,319,816
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,657,529	15,030,437	14,141,580	13,029,559	17,168,854
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	149,713,612	149,714,918	299,743,700	169,816,474	172,350,796
2 DANA PERIMBANGAN	983,333,688	1,305,606,678	1,313,915,838	1,245,134,580	1,331,020,352
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26,264,579	29,020,240	27,927,638	28,566,413	21,002,154
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	868,511,959	982,698,080	965,435,235	965,435,235	1,028,451,956
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	88,557,150	293,888,359	320,552,965	251,132,932	281,566,242
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	661,399,189	478,452,578	431,001,926	472,145,927	622,142,858
3.1 Pendapatan Hibah	1,958,000	0	19,098,000	93,307,359	93,209,833
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	194,472,620	204,521,694	163,566,162	162,184,905	174,670,617
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	463,880,846	246,211,291	161,193,237	141,789,777	167,829,785
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	777,662	27,719,594	87,017,797	74,858,186	186,355,563
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	310,062	0	126,730	5,700	77,060
B BELANJA DAERAH	1,865,996,555	2,200,205,551	2,122,121,858	2,064,477,377	2,284,243,845
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,121,044,573	1,274,346,716	1,165,260,447	1,146,308,020	1,202,450,385
1.1 Belanja Pegawai	911,423,652	961,075,607	799,949,287	831,271,803	830,883,761
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	34,159,908	81,808,234	87,731,850	71,953,975	86,496,754
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4,500,000	0	595,390	5,261,400	29,926,400
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,880,038	15,347,391	16,400,000	17,297,397	14,947,500
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	160,890,165	214,928,828	255,766,877	220,523,445	240,190,638
1.8 Belanja Tidak Terduga	190,811	1,186,655	4,817,043	0	5,332
2 BELANJA LANGSUNG	744,951,983	925,858,836	956,861,411	918,169,357	1,081,793,460
2.1 Belanja Pegawai	54,131,113	56,958,806	42,559,182	45,856,734	44,909,104
2.2 Belanja Barang dan Jasa	464,500,743	523,752,143	619,081,519	668,002,464	762,004,637
2.3 Belanja Modal	226,320,127	345,147,887	295,220,710	204,310,159	274,879,719
C PEMBIAYAAN	91,254,055	162,504,812	15,860,272	68,117,091	41,318,271
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	93,312,055	162,604,812	26,558,272	93,843,091	56,475,714
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93,312,055	162,604,812	26,558,272	93,843,091	56,475,714
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,058,000	100,000	10,698,000	25,726,000	15,157,443
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,058,000	100,000	10,698,000	25,726,000	15,157,443
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	163,028,844	28,472,417	93,851,604	56,475,715	75,832,937





Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	1,786,400,782	1,943,172,688	2,058,136,261	2,121,040,458	2,193,530,988
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	776,214,149	807,050,192	1,008,710,712	940,110,335	1,010,779,481
1.1 Hasil Pajak Daerah	549,362,947	574,258,306	700,340,768	723,755,081	800,355,726
1.2 Hasil Retribusi Daerah	59,243,427	49,614,843	40,052,788	30,904,234	33,161,962
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35,341,143	35,317,015	47,788,911	42,390,003	45,521,728
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132,266,631	147,860,028	220,528,245	143,061,017	131,740,065
2 DANA PERIMBANGAN	681,684,333	878,197,109	851,680,517	879,456,757	869,958,858
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50,479,636	81,693,715	70,344,592	85,993,080	61,629,341
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	625,978,507	661,794,756	650,169,150	650,169,150	677,033,111
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	5,226,190	134,708,638	131,166,775	143,294,527	131,296,406
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	328,502,300	257,925,387	197,745,032	301,473,367	312,792,649
3.1 Pendapatan Hibah	0	75,172,241	0	63,614,005	61,115,544
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	170,161,549	155,640,141	160,398,117	177,854,387	191,850,863
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	158,090,751	5,000,000	7,500,000	0	18,878,781
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	250,000	250,000	1,418,859	5,350,000	6,197,000
3.6 Dana Desa	0	0	0	27,404,975	34,750,461
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	21,863,005	28,428,056	27,250,000	0
B BELANJA DAERAH	1,757,644,194	1,871,440,897	1,967,311,319	2,098,037,222	2,255,312,789
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,034,937,556	1,037,975,540	1,041,281,701	1,077,335,323	1,111,372,218
1.1 Belanja Pegawai	769,525,774	789,551,175	717,438,207	799,124,091	809,371,497
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	87,123,626	53,396,265	99,761,657	76,509,349	97,704,704
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2,723,500	3,460,600	2,625,220	3,669,400	4,090,975
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	29,044,000	57,917,772	63,053,038	68,853,538	77,845,228
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	146,440,463	128,894,438	158,354,579	128,983,786	122,324,572
1.8 Belanja Tidak Terduga	80,193	4,755,291	49,000	195,160	35,242
2 BELANJA LANGSUNG	722,706,638	833,465,357	926,029,618	1,020,701,899	1,143,940,571
2.1 Belanja Pegawai	17,551,898	17,911,640	24,302,185	21,679,967	17,011,545
2.2 Belanja Barang dan Jasa	512,835,219	557,885,790	650,101,466	740,613,275	833,228,943
2.3 Belanja Modal	192,319,521	257,667,927	251,625,967	258,408,656	293,700,083
C PEMBIAYAAN	214,951,519	168,233,832	234,630,826	300,364,137	299,205,588
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	281,934,472	246,301,607	239,965,694	326,593,002	323,367,373
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	281,913,662	243,708,107	239,965,694	325,455,768	323,367,373
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	2,593,500	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	20,810	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	1,137,234	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	66,982,953	78,067,775	5,334,868	26,228,865	24,161,785
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	66,982,953	78,067,775	5,334,868	26,228,865	24,161,785
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	243,708,107	239,965,623	325,455,768	323,367,374	237,423,787



Table 19. Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	13,118,282,779	16,301,268,155	17,086,951,881	19,440,304,772	21,746,685,551
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,549,203,863	5,181,818,990	6,512,891,332	8,621,023,614	10,209,969,533
1.1 Hasil Pajak Daerah	3,422,480,277	3,832,813,519	4,810,890,695	6,587,079,466	8,171,457,530
1.2 Hasil Retribusi Daerah	267,093,902	313,996,735	306,821,552	366,199,453	478,196,509
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	198,244,290	226,103,844	336,573,195	359,009,745	269,624,428
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	661,385,394	808,904,891	1,058,605,891	1,308,734,949	1,290,691,066
2 DANA PERIMBANGAN	576,836,925	8,720,362,395	8,136,948,435	7,845,733,383	8,107,995,433
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	296,484,890	336,848,828	368,660,565	373,549,570	332,011,731
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	5,249,585,922	5,916,618,559	5,973,602,100	5,823,545,145	6,074,180,578
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	381,516,540	2,466,895,008	1,794,685,770	1,648,638,668	1,701,803,124
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,641,491,564	2,399,086,770	2,437,112,114	2,973,547,775	3,428,720,585
3.1 Pendapatan Hibah	0	195,890,947	122,886,007	359,446,020	503,161,236
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,091,618,295	1,330,155,378	1,242,297,766	1,109,199,106	1,182,400,248
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,465,441,715	695,024,829	755,416,533	840,822,078	902,658,032
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79,320,484	150,352,137	280,036,243	569,760,686	569,760,686
3.6 Dana Desa				67,069,885	67,069,885
3.7 Lainnya	5,111,070	27,863,479	36,475,565	27,250,000	27,250,000
B BELANJA DAERAH	13,936,249,170	17,389,385,449	18,841,822,771	21,129,008,534	23,166,949,643
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,824,140,413	10,124,942,503	9,810,169,567	11,214,096,011	12,081,110,019
1.1 Belanja Pegawai	6,824,110,017	7,626,377,916	6,621,826,554	6,966,226,965	7,334,423,343
1.2 Belanja Bunga	8,265,000	10,350,000	10,290,000	16,950,000	23,081,700
1.3 Belanja Subsidi	5,420,000	4,550,000	9,340,792	9,527,608	11,441,488
1.4 Belanja Hibah	517,643,029	370,275,326	752,668,658	1,124,689,681	1,293,879,716
1.5 Belanja Bantuan Sosial	62,666,043	57,292,411	85,260,498	276,883,868	296,036,098
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	401,513,984	506,651,646	614,647,632	840,211,696	1,037,859,664
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	987,161,313	1,530,029,504	1,696,591,439	1,949,090,315	2,050,047,146
1.8 Belanja Tidak Terduga	17,361,027	19,415,700	19,543,995	30,515,878	34,340,864
2 BELANJA LANGSUNG	5,112,108,757	7,264,442,946	9,031,653,205	9,914,912,523	11,085,839,624
2.1 Belanja Pegawai	299,007,129	370,512,310	422,575,431	426,519,636	471,397,283
2.2 Belanja Barang dan Jasa	2,620,405,931	3,503,635,718	4,590,147,898	5,648,656,275	6,518,218,486
2.3 Belanja Modal	2,192,695,697	3,390,294,918	4,018,929,875	3,839,736,613	4,096,223,855
C PEMBIAYAAN	215,632,438	1,189,780,327	1,754,870,890	1,688,703,762	1,420,264,092
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	957,931,118	1,455,805,503	1,863,386,760	1,787,833,434	1,511,396,535
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	952,293,224	1,298,715,940	1,480,408,525	1,551,210,767	1,014,946,535
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	150,000,000	317,000,000	231,222,667	490,300,000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	59,913,672	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	664,563	664,563	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergilir	62,894	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5,575,000	6,425,000	5,400,000	5,400,000	6,150,000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	139,964,727	266,025,176	108,515,869	99,129,672	91,132,443
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	25,350,000	0	0	5,000,000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	108,871,727	210,995,176	48,707,706	65,379,672	43,007,443
2.3 Pembayaran Pokok Utang	25,893,000	24,080,000	51,033,163	28,350,000	37,725,000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	3,375,000	0	0
2.5 Lainnya	5,200,000	5,600,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	101,663,033	0	0	0





Tabel 20. Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2015 - 2019 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A PENDAPATAN DAERAH	14,654,841,029	16,470,143,429	17,783,197,464	18,244,495,045	19,728,457,777
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,377,762,614	6,086,850,948	7,303,473,416	7,601,456,606	8,282,415,873
1.1 Hasil Pajak Daerah	3,891,979,288	4,334,304,614	5,129,370,804	5,615,466,588	6,279,451,622
1.2 Hasil Retribusi Daerah	325,836,952	320,066,942	313,799,423	331,414,145	422,829,260
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	238,468,489	285,720,740	366,918,856	342,680,112	348,845,280
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	924,477,885	1,146,758,652	1,493,384,332	1,311,915,492	1,231,289,712
2 DANA PERIMBANGAN	5,881,930,984	7,831,945,296	7,801,295,966	7,663,870,128	7,914,899,083
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	219,858,842	321,745,524	305,819,359	321,463,409	239,018,134
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	5,249,585,922	5,916,618,568	5,814,778,940	5,822,785,189	6,148,315,125
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	412,486,220	1,593,581,204	1,680,697,667	1,519,621,531	1,527,565,824
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,395,147,431	2,551,347,185	2,678,428,081	2,979,168,312	3,531,142,821
3.1 Pendapatan Hibah	344,369,417	397,423,724	212,068,921	396,589,088	673,889,585
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,277,011,636	1,181,264,543	1,036,784,569	1,203,917,081	1,109,033,617
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,695,952,320	629,197,701	514,947,985	735,302,020	699,098,948
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65,078,981	167,248,456	691,233,541	441,455,035	742,776,516
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,735,077	176,212,762	223,393,065	82,250,719	43,011,328
B BELANJA DAERAH	14,189,147,619	16,533,539,583	17,986,825,133	18,934,523,129	19,596,783,426
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,637,940,756	9,340,713,622	9,799,040,663	10,718,866,798	10,739,632,293
1.1 Belanja Pegawai	6,339,563,403	6,700,407,599	6,163,221,219	6,683,300,393	6,694,693,865
1.2 Belanja Bunga	4,502,374	2,612,207	3,616,311	11,241,138	9,250,781
1.3 Belanja Subsidi	5,393,600	4,378,338	7,476,568	5,770,880	5,167,970
1.4 Belanja Hibah	496,207,517	437,080,198	967,798,194	1,281,389,934	913,707,505
1.5 Belanja Bantuan Sosial	45,932,545	57,018,294	118,214,663	258,547,451	351,463,496
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	456,919,401	560,004,843	686,129,737	730,814,038	852,615,725
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,288,133,748	1,571,213,496	1,833,957,248	1,736,370,663	1,902,232,555
1.8 Belanja Tidak Terduga	1,288,168	7,998,647	18,626,723	11,432,300	10,500,396
2 BELANJA LANGSUNG	5,551,206,863	7,192,825,962	8,187,784,470	8,215,656,330	8,857,151,132
2.1 Belanja Pegawai	336,329,146	374,298,415	392,599,073	468,042,278	456,689,920
2.2 Belanja Barang dan Jasa	2,941,885,878	3,544,213,834	4,479,083,457	5,042,250,977	5,918,352,316
2.3 Belanja Modal	2,272,991,839	3,274,313,712	3,316,101,940	2,705,363,076	2,482,108,897
C PEMBIAYAAN	1,786,336,357	2,088,753,191	1,924,410,235	1,630,983,308	852,488,169
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,212,791,302	2,255,623,134	2,012,981,577	1,749,346,849	1,021,366,305
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,204,919,524	2,251,417,953	1,894,909,759	1,270,299,990	941,079,201
1.2 Pencairan Dana Cadangan	455,618	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	113,865,537	26,654,186	73,819,258
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	2,593,500	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	776,697	651,670	51,481	0	15,723
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1,164,463	9,507	921,799	2,390,794	1,652,123
1.7 Lainnya	5,475,000	950,505	3,233,000	1,879	4,800,000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	426,454,945	166,869,944	88,571,341	118,363,541	168,878,136
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	3,800,000	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	393,828,537	142,534,172	65,641,644	78,304,865	71,769,228
2.3 Pembayaran Pokok Utang	23,826,408	23,826,408	19,249,105	28,333,908	94,008,908
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	3,100,000
2.5 Lainnya	5,000,000	509,364	3,680,592	11,724,768	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	2,252,029,767	2,025,357,036	1,720,782,566	940,955,225	984,162,520

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar- 80226
Telp: (0361) 2381, Fax: 23162
Email: bps5100@bps.go.id
Website: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2477-7773



9 772477 777006